

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Muamalat**

##### **1. Pengertian Bank Muamalat**

Transaksi dengan memakai hukum syariah tidak menjadikan bunga sebagai pedoman dalam memberikan keuntungan. Transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* (*return* selalu beriringan dengan resiko). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

UUD 1945 telah memberi kebebasan kepada warga Negara Indonesia untuk melaksanakan agama sesuai keyakinannya, termasuk umat Islam diberi kebebasan untuk mengadakan kegiatan ekonomi secara syariah. Ekonomi syariah dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan ruang lingkup kegiatan ekonomi syariah yang menjadi salah satu kewenangan hakim pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah

dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Kegiatan lokakarya MUI yang mengambil tema Masalah Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor melahirkan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI tersebut memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Izin pendirian dilakukan secara bertahap, yakni dari BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto yang menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Seluruh anggota kelompok kerja telah menyepakati terkait nama bank, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Muamalat dalam istilah fiqih berarti hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariat Islam. Berdasarkan pengalaman pemakaian kata 'syariat islam' pada Piagam Jakarta tidak dipilih, nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata Islam, menjadi Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Kepemilikan saham Saham Bank Muamalat 50% lebih dikuasai pemodal asing. *Islamic Development Bank* menguasai sebanyak 32,7

persen saham, sedangkan 19 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh *Atwill Holdings Limited* dan *National Bank of Kuwait*. Sejak kehadirannya pada 27 Syawwal 1412 Hijriah, Bank Muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah.

Kehadiran Bank Muamalat tidak saja sebagai bank pertama murni syariah, namun juga sebagai pelopor penggunaan jaringan *Real Time Online* terluas di Indonesia. Bank Muamalat memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 33 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>15</sup>

## **2. Prinsip Bank Muamalat**

Bank muamalat menjalankan perusahaan menggunakan prinsip syariah Islam yaitu tepatnya Mei 1992. Bank Muamalat mendapatkan legalitas menjalankan usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan No.430/KMK.013/1992 tanggal 12 April 1992. Bank muamalat memiliki tujuan yang sama seperti bank konvensional, yakni agar lembaga perbankan yang dilakukan mendapat keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan tujuannya. Larangan transaksi-transaksi perbankan ditinjau dari Hukum Islam sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Perniagaan atas barang-barang yang haram.
- b. Bunga (ربا *riba*).

---

10.14 <sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Muamalat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia) diakses 19 Juli 2017 Jam

<sup>16</sup> <http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/04/perbankan-syariah-bank-muamalat/>

- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسير maisir).
- d. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر gharar).

### 3. Legalitas Bank Muamalat

Legalitas Bank Muamalat secara yuridis normatif dan yuridis empiris dapat menjalankan usahanya di seluruh Indonesia. Legalitas secara yuridis normatif tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, Bank Muamalat mendapat kesempatan dan peluang yang baik untuk membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.

Awal berdiri Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat di Indonesia dimulai dari tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah membuat Paket Kebijakan Oktober (Pakto) bertujuan untuk mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>17</sup> Hubungan itu didasari sebagai bentuk penerimaan aspirasi antara masyarakat muslim dengan pemerintah sehingga terbentuk lembaga keuangan (bank syariah) yang melayani transaksi perbankan dengan bebas bunga. Seiring berjalan waktu Bank Muamalat semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mewarnai dalam sistem perbankan nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah peraturan yang mendasari bank beroperasi secara *dual bank system*, dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 lebih menata

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *loc cit.*, hlm 6.

pada kelembagaan dan kegiatan operasional didasari prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>18</sup> Regulasi perbankan syariah dibuat sebagai dasar hukum dan menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

#### 4. Tujuan Bank Muamalat

Perbankan Islam semakin berkembang didasari prinsip syariah muamalat memiliki azas bahwa tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang keduniawian dan keagamaan.<sup>19</sup> Pencapaian urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Prinsip ini juga mewajibkan ketaatan sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, yang artinya ketaatan tidak hanya alam ibadah ritual tetapi juga dalam transaksi bisnis dalam hal ini perbankan juga harus sesuai prinsip syariah.

*Handbook of Islamic Banking* menerangkan bahwa tujuan dasar dari perbankan Islam adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Perbankan Islam bukan hanya bertujuan keuntungan semata, selain itu lebih menekankan kepada keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim dan masyarakat luas.<sup>20</sup> Bank muamalat yang sudah berjalan dan semakin meningkat saat ini mempunyai

---

<sup>18</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011, hlm 5.

<sup>19</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani, cet ke-8, 2004, hlm 167.

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007, hlm 21.

tugas dan tujuan yakni sebagai suatu lembaga yang menekankan kepada aspek kesejahteraan sosial.

## **5. Produk Bank Muamalat**

### **a. Penyaluran Dana**

- 1) Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah
- 2) Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah
- 3) Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil
- 4) Pembiayaan atas dasar prinsip Qardhul Hasan
- 5) Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

### **b. Penghimpunan Dana**

- 1) Giro atas dasar prinsip Wadiah
- 2) Deposito atas dasar prinsip Mudharabah
- 3) Tabungan atas dasar prinsip Mudharabah

## **B. Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)**

Beberapa ahli praktisi dan peneliti sampai saat ini masih memiliki perbedaan dalam memberikan definisi mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sehingga *Corporate Social Responsibility (CSR)* dimana batasannya belum sama. Dalam bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (1997), Elkington menjelaskan bahwa perusahaan yang memperlihatkan tanggung jawab sosialnya akan memiliki tujuan pada kemajuan masyarakat, khususnya

komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup/bumi (*planet*), dan peningkatan kualitas perusahaan (*profit*).

CSR adalah serangkaian upaya perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan mendasari upaya seperti ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum. Pengusaha dalam menentukan keputusannya harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan memberikan perhatian secara lebih seimbang terhadap kepentingan *stakeholder* yang beragam.

Definisi CSR oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBSCD) yakni sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para pekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal.<sup>21</sup>

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan dalam berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan dalam hal aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) bahwa CSR merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi, yang memiliki keseimbangan adanya peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan.

---

<sup>21</sup>Maignan I Ferrell, *Corporate Citizenship: Cultural Antecedents And Business Benefits*, alih bahasa oleh Mursitama, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 26.

## 2. *Triple Bottom Lines*

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian perusahaan yang memiliki dasar tiga prinsip yang dikenal dengan *triple bottom lines* oleh Eklington;<sup>22</sup>

- a. *Profit*, adalah salah satu unsur terpenting dalam setiap kegiatan usaha.

Perusahaan harus tetap memperoleh keuntungan ekonomi agar perusahaan dapat terus berjalan dan melakukan kegiatan. Aktivitas yang dilakukan untuk memaksimalkan profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

- b. *People*, perusahaan harus mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Masyarakat sekitar perusahaan menjadi salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan keberadaannya, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Perusahaan perlu memiliki komitmen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Misalnya, pembagian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pemberian akses permodalan bagi pengusaha lokal.

- c. *Planet*, interaksi perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, yakni jika perusahaan dapat menjaga dan peduli terhadap lingkungan maka perusahaan akan mendapatkan nilai positif dari

---

<sup>22</sup>Maignan I Ferrell, *op. cit.*, hlm 11.



lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan dan keragaman hayati yang berkelanjutan merupakan keharusan bagi perusahaan. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (ekoturisme).

### **3. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives*, memiliki dua manfaat CSR apabila ditinjau dari keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari tinjauan internal dan eksternal. Manfaat dari tinjauan internal yaitu:<sup>23</sup>

- a. Pengembangan aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan praktik-praktik ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.
- b. Adanya upaya penanganan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan *supplier* berjalan dengan baik. Tujuannya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.
- c. Menciptakan budaya perusahaan, peningkatan keahlian sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.
- d. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah *go public* menjadi lebih baik.

---

<sup>23</sup>Arif Budiman, “*Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspective*”, artikel diakses tanggal 13 Mei 2017 dari <http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-and-resource-based-perspective.html>.

Manfaat eksternal CSR yang dapat diperoleh sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Penerapan CSR akan menumbuhkan reputasi perusahaan sebagai badan yang melakukan dengan baik pertanggung jawaban secara sosial.
- b. CSR adalah salah satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.
- c. Melakukan CSR dan membuka kegiatan CSR secara *public* merupakan sarana untuk komunikasi yang baik dengan masyarakat.

#### **4. Pro Kontra Tanggung Jawab Perusahaan**

Permasalahan yang muncul dengan kewajiban perusahaan memiliki tanggung jawab dalam aspek sosial dan lingkungan atau tidak sampai saat ini masih menjadi pembahasan yang sering menimbulkan konflik. Masyarakat beranggapan dan mengklaim bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar. Beberapa alasan para masyarakat yang pro terhadap perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Keterlibatan sosial merupakan jawaban terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang hal ini dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>A. B. Susanto, *Reputatiton Driven Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Erlangga,2009), hlm 28.

- b. Keterlibatan sosial mungkin akan berpengaruh terhadap perbaikan lingkungan dan masyarakat yang mungkin dapat menekan pada biaya produksi.
- c. Meningkatkan nama baik perusahaan yang akan menumbuhkan simpati pelanggan, simpati karyawan, investor dan lain-lain.
- d. Menghindari adanya keterlibatan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Keterlibatan pemerintah cenderung mengurangi peran perusahaan, sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pengurangan kegiatan perusahaan.
- e. Dapat memperlihatkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku, serta mendapat simpati dari masyarakat.
- f. Ikut serta menjaga kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan seni budaya, peningkatan pendidikan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain.

Dipihak lain yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau pihak yang kontra memiliki alasan.

- a. Munculnya lingkungan bisnis yang monoton, bukan yang bersifat *pluralistic*.
- b. Perusahaan menjadi tidak fokus terhadap tujuan utamanya dalam memaksimalkan laba dan memicu adanya pemborosan.
- c. Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan.
- d. Keterlibatan sosial membutuhkan dana dan tenaga cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas. Hal ini, dapat

menimbulkan kebangkrutan ataupun menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.

- e. Keterlibatan kegiatan sosial memiliki hubungan yang luas memerlukan tenaga dan parah ahli yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan.

### C. Teori-Teori Tentang *Cosporate Social Responsibility*

Alasan yang mendasari dan menjadi nilai-nilai yang melatarbelakangi perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan pelaksanaan CSR di masyarakat. Alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori sebagai berikut.<sup>26</sup>

#### 1. *Agency Theory*

Teori keagenan lebih menekankan pada hubungan antara dua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal. Teori ini menunjukkan adanya hubungan keagenan dapat muncul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambil kebijakan kepada agen. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengatur perusahaan.

Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan tujuan dari masing- masing pihak. Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian

---

<sup>26</sup>Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 38.

perusahaan dapat berpengaruh pada manajer untuk bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Manajer dapat mengambil tindakan yang hanya bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham.

Keadaan tersebut dapat muncul karena adanya informasi bahwa manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang daripada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi.

Berdasarkan teori agensi, pemimpin perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak melakukan tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat luas. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya terkait dengan proses jalannya bisnis sesuai dengan kemauan pemilik perusahaan, yakni memaksimalkan laba. Agen haruslah menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan pada saat yang bersamaan. Semua hubungan baik tersebut dikembangkan oleh agen dalam rangka mengusahakan terciptanya maksimasi laba. Perusahaan memakai retorika *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan laba secara signifikan.

## 2. *Legitimacy Theory*

Legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Legitimasi sebagai upaya untuk mempersatukan sudut pandang bahwa tindakan yang dilaksanakan suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Organisasi berusaha untuk meningkatkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diperoleh dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu mengambil peran dan pada posisinya.

Ada beberapa upaya yang perlu dilaksanakan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif yaitu:

- a. Melaksanakan identifikasi dan komunikasi dengan cara berdialog dengan publik.
- b. Melaksanakan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai social kemasyarakatan dan lingkungan, serta menciptakan presepsi tentang perusahaan.
- c. Melaksanakan strategi *legitimasi* dan penjabaran terkait dengan CSR.

## 3. *Stakeholders Theory*

*Stakeholders Theory*, mengasumsikan bahwa *stakeholders* dapat menentukan eksistensi perusahaan. Perusahaan berusaha mendapatkan pembenaran dari para *stakeholders* dalam melakukan operasi perusahaannya. Posisi *stakeholders* yang kuat, membuat semakin besar

kecenderungan perusahaan mengakomodir terhadap keinginan para stakeholdersnya. *Stakeholders Theory* mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut.

- a. Perusahaan mempunyai hubungan dengan banyak kelompok *stakeholder* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
- b. Teori ini mengutamakan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholder*-nya.
- c. Kepentingan seluruh legitimasi *stakeholders* memiliki nilai hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
- d. Teori ini memfokuskan pada penentuan kebijakan manajerial.

Teori *stakeholders* menjelaskan penjabaran program CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melakukan program CSR, karena upaya program CSR adalah bagian dari peran perusahaan ke *stakeholders*. Perusahaan akan terdorong untuk melakukan program CSR dengan teori ini. Implementasi CSR diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan yaitu proses kelangsungan usahanya.

#### **D. Nilai-Nilai Syariah**

Beberapa prinsip menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan maslaha (kepentingan

masyarakat). Prinsip-prinsip ini sebetulnya punya hubungan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>27</sup>

### 1. Prinsip Berbagi dengan Adil

Kata berbagi dalam Islam dituangkan pada petunjuk dan perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ini menuntun dan mendidik manusia bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain. Berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta melaksanakan *amarna'ruf nahi munkar* (saling mengingatkan dan menasehati untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Pada praktik perbankan syariah prinsip ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

Agama Islam memiliki tuntunan dan tatanan hidup yang sempurna untuk berinteraksi dalam hidupnya yang ditunjukkan dengan adanya berbagai aturan atau perintah didalam sebuah kehidupan didunia salah satunya adalah dengan saling berbagi atau membantu antar umat manusia. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 254 sebagai berikut.

Q.S. Al-Baqarah : 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٍ وَلَا شَفِيعَةٍ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

---

<sup>27</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: Republika, 2012), jilid 4, hlm 187.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at, dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.*”<sup>28</sup>

Q.S. Al-Anfal : 3

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>29</sup>

Q.S. Al-Haj : 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”<sup>30</sup>

Prinsip berbagi dalam hal ini berhubungan erat dengan konsep keadilan merupakan inti nilai dalam Islam. Keadilan menjadi salah satu komponen penting yang membentuk cara pandang Islam mengenai masyarakat, karenanya suatu masyarakat madani tidak bias tercapai tanpa adanya keadilan.<sup>31</sup> Konsep Islam mengenai keadilan tidak sama dengan konsep formal mengenai keadilan, keadilan dalam Islam menjadi bagian dari iman, karakter, dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan

---

<sup>28</sup>Ibid, hlm 187.

<sup>29</sup>Ibid,

<sup>30</sup>Ibid.

<sup>31</sup>Ibid.

karakteristik dari suatu system dan merupakan bagian yang sangat dibutuhkan dalam suatu sistem hukum, sosial, dan ekonomi.

Keadilan dalam kegiatan ekonomi dituangkan dalam kaidah fiqih, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Prinsip keadilan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam praktik *mudharabah* (berbagi keuntungan dan kerugian), dimana pemilik modal dan pengguna modal (pekerja) ditempatkan pada posisi yang sejajar.<sup>32</sup> Prinsip adil dalam Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasinya dalam aktivitas ekonomi ialah bahwa pelaku ekonomi tidak dibenarkan hanya mencari keuntungan pribadi semata, karena dapat menyebabkan kerusakan atau merugikan pihak lain.

## 2. Prinsip *Rahmatan Lil'alam* (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Prinsip *rahmatan lil'alam* memiliki arti bahwa keberadaan manusia seharusnya dapat memiliki manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Manfaat dengan diwujudkannya bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun penentuan akses modal kepada para pengusaha kecil. Prinsip *rahmatan lil'alam* ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran:

Q.S. Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

Artinya: “*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”<sup>33</sup>

Agama Islam menuntun dan menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara hubungan antar sesama manusia. Memelihara dan menjaga kelestarian terdapat dua sisi yaitu kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* adalah bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil’alamin* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual, dalam tujuan syariah tidak ditujukan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua *stakeholders* (masalah).

### 3. Prinsip Masalah (Kepentingan Masyarakat)

Al-Shatibi menjadi penentu dalam prinsip masalah bahwa masalah dibagi dalam tiga kelompok yaitu: *embellishment (tahsiniyyat)*, *essentials (daruriyyat)*, *complementary (hajiyyat)*, yang secara ringkas tergambar dalam konsep dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Konsep Prinsip Masalah**



Level yang pertama yaitu daruriyyat, didefinisikan oleh Al-Shatiby sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman),

<sup>33</sup>Al-Ghazali, Abu Hamid., *op. Cit.*

*life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Komponen *daruriyyat* dalam piramida masalah berada pada tingkatan pertama, hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan atau melindungi kepentingan yang berkaitan dengan daruriyat merupakan prioritas yang harus dilakukan. Implikasinya dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah bank syariah harus mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan.

Tingkatan kedua adalah *hajiyyat* dijelaskan oleh Al-Shatiby merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan.

Tingkatan ketiga dari piramida masalah adalah prinsip *tahsiniyyat*. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Tingkatan ini bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan stakeholdernya. Mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

Penggunaan prinsip masalah sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Dalam hal ini level masalah yang diajukan Al-Shatibi dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus menjadi prioritas agar tidak timbul ketidakadilan. Menilai bahwa klasifikasi masalah berhubungan dan punya keterkaitan yang erat dengan tujuan syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi secara baik.

#### **E. *Shariah Enterprise Theory***

*Shariah Enterprise Theory* adalah bagian dari teori akuntansi yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam untuk memperoleh teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Enterprise theory* mampu menjadi tempat kemajemukan masyarakat, hal yang tidak mampu dilaksanakan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada *stakeholders*.

Konsep *enterprise theory* lebih menyerupai *stakeholders theory*, karena kedua teori ini mengakui keberadaan *stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan masalah), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* dijelaskan bahwa

kesejahteraan tidak hanya ditujukan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia).

Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang menggunakan dasar pada nilai-nilai syariah, karena mengutamakan akuntabilitas yang lebih luas. Kekuasaan ekonomi ini diversifikasi dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang perputaran kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.<sup>35</sup> Hal tersebut menyebabkan *enterprise theory* perlu ditingkatkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari'ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET).

Dalam konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya mengacu kepada tingkat kepedulian di tingkatan individu (dalam hal ini pemegang saham), akan tetapi pihak-pihak lainnya. SET memiliki kepedulian yang tinggi *stakeholders* yang luas, meliputi Allah, manusia, dan alam semesta.<sup>36</sup>

*Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. SET terbagi dalam dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan manfaat pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. *Direct stakeholders* mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Pihak yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah mereka yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan manfaat bagi kehidupan perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain- lainnya. Alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

*Shariah enterprise theory* merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR, yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *agency theory* yang mana teori ini hanya mengedepankan kepentingan *principal* (pemegang saham). *Legitimacy theory* merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan *stakeholder theory* merupakan teori yang mengutamakan kepentingan *stakeholders*, akan tetapi *stakeholders* yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Perbedaan dengan *stakeholders* yang dimaksud dalam *shariah enterprise theory* yaitu Allah, manusia, dan alam. Berikut ini lebih jelas digambarkan dalam tabel perbedaan keempat teori-teori tersebut;

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Agency Theory, Legitimacy Theory, Stakeholders Theory, dengan Shariah Enterprise Theory (SET)**

<i>Agency Theory</i>	<i>Legitimacy Theory</i>	<i>Stakeholder Theory</i>	<i>Shariah Enterprise Theory (SET)</i>
Manajer bertanggung jawab	Perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat.	Perusahaan bertanggung jawab kepada para <i>stakeholders</i> (manusia)	Allah sebagai pusat pertanggung jawaban.
Menjalankan perusahaan sesuai keinginan <i>principal</i> (pemilik perusahaan).	Menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlakudalam masyarakat.	Berorientasi pada kesejahteraan <i>stakeholders</i> perusahaan.	Menjalankan perusahaan sesuai dengan cara & tujuan syariah.
Berorientasi memaksimalkan laba perusahaan.	Pengungkapan CSR bersifat <i>mandatory</i> (wajib) dengan mempertimbangkan hak-hak publik secara umum.	Pengungkapan CSR sebagai alat untuk berkomunikasi dengan <i>stakeholders</i> .	Kepedulian terhadap <i>stakeholders</i> yang luas (Allah SWT, manusia, & alam)
Perusahaan melaporkan CSR hanya untuk menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholders</i> .			Pengungkapan CSR sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap amanah dari Allah SWT.

Secara implisit dapat dipahami bahwa SET tidak meletakkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia serta alam semesta. Posisi manusia



di sini hanya sebagai wakilnya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah.

Ketaatan yang dilakukan oleh manusia dan alam dilakukan dalam dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.<sup>37</sup>

#### 1. Menentukan Item Pengungkapan *Shariah Enterprise Theory* (SET)

Item pengungkapan SET diserap dari penelitian Meutia (2009), yang dikembangkan dari dua dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas vertikal yang ditujukan hanya kepada Allah swt, dan akuntabilitas horizontal yang ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders* (karyawan dan nasabah), *indirect stakeholders* (komunitas), dan alam. Rincian item pelaporan SET antara lain sebagai berikut.<sup>38</sup>

##### a. Akuntabilitas vertikal

- 1) Adanya opini DPS.
- 2) Pelaporan mengenai fatwa aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi.

##### b. Akuntabilitas horizontal (*direct stakeholder*) nasabah

- 1) Adanya pelaporan kualifikasi dan pengalaman anggota dewan pengawas syariah (DPS).
- 2) Laporan mengenai dana zakat dan qardhul hasan.
- 3) Informasi produk dan konsep syariah.

---

<sup>37</sup> Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 5.

<sup>38</sup> Meutia, Intan. *Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba Untuk KAP Big 5 dan Non Big 5*. Jurnal Riset Akutansi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2004. Pp 37-52.

- 4) Jumlah pembiayaan.
- 5) Penjelasan mengenai kebijakan/usaha untuk 1 transaksi non syariah.

c. Akuntabilitas horizontal (*direct stekholder*) karyawan

- 1) Pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunersi.
- 2) Kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan.
- 3) Ketersediaan layanan kesehatan bagi karyawan.
- 4) Fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.

d. Akuntabilitas horizontal (*indirect stakeholder*) komunitas

- 1) Pelaporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam.
- 2) Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan ham.
- 3) Kebijakan pembiayaan yang mepertimbangkan kepentingan masyarakat banyak.
- 4) Kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan.

e. Akuntabilitas horizontal kepada alam

- 1) Pelaporan mengenai kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara.

- 2) Menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
- 3) Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.
- 4) Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon).
- 5) Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energi dan konservasi.
- 6) Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.

#### **F. Konsep dan Karakteristik Pengungkapan CSR Menurut *Shariah Enterprise Theory***

*Shariah enterprise theory* mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut adalah:<sup>39</sup>

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah dan karenanya ditujukan untuk memperoleh ridho (*legitimasi*) dari Allah sebagai tujuan utama.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct, indirect, dan alam*).

---

<sup>39</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 239.

3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib, dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu indikator mewujudkan tujuan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spiritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.
5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus mempunyai nilai tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

*Shariah enterprise theory* mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang dijabarkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini adalah:<sup>40</sup>

1. Memperlihatkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders*, *direct stakeholders*, dan alam.
2. Memperlihatkan upaya pemenuhan kebutuhan material dan spiritual setelah seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh konsep keseimbangan.
3. Memperlihatkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk menyajikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

#### **G. Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Dalam pengungkapan tanggung jawab sosial diperlukan beberapa dimensi yang dianjurkan oleh *shariah enterprise theory* dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

syariah. Adapun diantara Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.<sup>41</sup>

Akuntabilitas vertikal ini, diperuntukkan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan memperlihatkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Item selanjutnya akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah komunitas.

Beberapa *item* pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan *qardhul hasan* serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema *Profit and Loss Sharing* (PLS), dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang.

Item yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan

---

<sup>41</sup> Muhammad Sugerty, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm 243.

mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, pelatihan, dan kesempatan meningkatkan karir.

Beberapa item yang memperlihatkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders*, dalam hal ini komunitas, berdasarkan *shariah enterprise theory*.

Item tersebut antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk menumbuhkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang didasari atas kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan.

Item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang memiliki potensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha untuk menumbuhkan tingkat kesadaran lingkungan pada pegawai.

## H. Penelitian Terdahulu

1. Diah Febriyanti, 2010. Penelitian yang berjudul “*Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada PT. Bank X, Tbk)*”. Penelitian ini menerangkan bahwa adanya peranan penting antara penerapan GCG dengan pelaksanaan praktik CSR, dimana dengan penerapan prinsip GCG maka implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih fokus dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dari tahun ke tahun. Motivasi perusahaan dalam melakukan praktik CSR dan pengungkapan adalah untuk melaksanakan prinsip GCG secara utuh, memenuhi harapan *stakeholders*, mendapatkan legitimasi dan memenangkan penghargaan tertentu.
2. Nadia Rahma, 2012. Penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia*”. Penelitian ini menerangkan bahwa pengungkapan indeks ISR pada enam bank syariah Indonesia dapat dikatakan baik, yakni 64,83% secara keseluruhan, walaupun masih belum mencapai angka 100% dikarenakan masih adanya item-item indeks ISR yang belum diungkapkan secara penuh.
3. Sari Hardiyanti, 2013. Penelitian ini berjudul “*Analisis Hubungan Syariah Governance Structure Terhadap Tingkat Pengukuran Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Penelitian ini menerangkan bahwa *investment account holders* dan ukuran perusahaan

memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Aditya Priyanto Putra, 2013. Penelitian ini berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)*”. Program kemitraan dan bina lingkungan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas utama perseroan menggunakan dasar PSAK 45-pelaporan keuangan entitas nirlaba. Sedangkan program partisipasi pemberdayaan lingkungan secara keseluruhan dilaporkan sebagai beban pada laporan keuangan utama perseroan, dalam pos beban lain-lain dengan nama comdev (*community development*). Aktivitas CSR PT. PLN (persero) juga dilaporkan dalam *sustainability report* dalam bentuk *narrative reporting* dan menggunakan *global reporting initiative* (GRI G3) sebagai pelaporannya, sehingga telah memenuhi semua indikator pelaporan.

Dalam keempat penelitian terdahulu, ada beberapa aspek yang menjadi perbedaan dengan penelitian sekarang, yaitu pembahasan terdahulu lebih spesifik pada penerapan *Good Corporate Governance*, *Islamic Social Reporting*, *Sharia Governance*, dan perlakuan akuntansi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pada penelitian ini penulis sekarang mencoba untuk menganalisis dari perspektif *Shariah Enterprise Theory*.